

**LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN  
INDEKS ZONA INTEGRITAS  
INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (SPAK)  
TRIWULAN I TAHUN 2025**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 04 Tahun 2023  
PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**



**Disahkan di Gorontalo  
Pada Hari Kamis 27 Maret 2025**

**Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo**



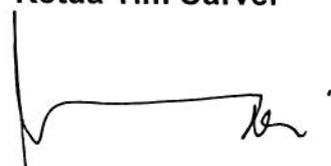
**Dr. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum**

**Penanggung Jawab Tim Survei**



**Ir. Endro Heryanto, S.H., M.H.**

**Ketua Tim Survei**



**Masdin Daliuwa, SH.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pelayanan Publik (*Public Service*) oleh Birokrasi merupakan salah satu perwujudan dan fungsi Aparatur Negara sebagai Abdi Masyarakat disamping sebagai Abdi Negara. Pelayanan Publik oleh Birokrasi dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian Pelayanan Publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah diterapkan.

Berbagai cara telah ditempuh atau dilakukan guna memperbaiki pelayanan publik oleh setiap instansi pemerintah, namun penyelenggaraan pelayanan publik masih tetap menjadi keluhan masyarakat karena tidak sesuai keinginan masyarakat. Seluruh pendekatan yang digunakan selama ini dalam upaya perbaikan pelayanan hanya berdasarkan kepada perintah sesuai penyedia layanan semata-mata, tidak dipadukan dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Gorontalo mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2024.

Pelaksanaan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan Saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga Laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Gorontalo, 27 Maret 2025

Tim Survei

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	1
<b>KUESIONER SURVEI</b> .....	1
1.1. Kuesiner Survei.....	1
<b>BAB II</b> .....	5
<b>METODOLOGI SURVEI</b> .....	5
2.1. Kriteria Responden.....	5
2.2. Metode Penelitian.....	5
2.3. Metode Pengolahan Data dan Analisis.....	5
<b>BAB III</b> .....	8
<b>PENGOLAHAN SURVEI</b> .....	8
3.1. Analisis Hasil Survei.....	8
3.2. Evaluasi Hasil Survey.....	22
3.3. Tindak Lanjut Hasil Survei .....	23
<b>BAB IV</b> .....	24
<b>DATA SURVEI</b> .....	24
4.1. Data Responden.....	24
4.2. Data Dukung Lainnya.....	27

# BAB I

## KUESIONER SURVEI

### 1.1. Kuisisioner Survei

Kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tingkat unit/satuan kerja bertujuan untuk menemukan model praktik terbaik (*best practices*) dari unit/satuan kerja yang berhasil mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM agar dapat dijadikan contoh bagi unit/satuan kerja lain. Oleh sebab itu, fokus pembangunan ZI tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

Disamping itu, melihat dinamika dan perkembangan ZI pada instansi pemerintah, maka perlu dilakukan ulang terkait pembatasan kuota dan penyelenggaraan survei. Sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, SPAK dan SPKP dilakukan terhadap pengguna layanan (pemangku kepentingan) dari unit/satuan kerja Instansi Pemerintah. Selama ini kedua survei tersebut tidak hanya diselenggarakan oleh instansi pemerintah/unit/satuan kerja yang sedang melakukan pembangunan ZI, namun juga dilakukan oleh Tim Penilai (TPN) sebagai rangkaian proses evaluasi ZI. Proses yang berulang dipandang kurang efisien dan efektif sehingga perlu dilakukan simplifikasi pelaksanaan survei yang dilakukan secara mandiri oleh unit/satuan kerja yang sedang melakukan pembangunan ZI atau unit lain yang ditunjuk instansi pemerintah.

Dengan adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas, yang menyatakan bahwa setiap satuan kerja yang akan diusulkan pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM wajib melaksanakan survey mandiri yang terdiri dari Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), maka dengan demikian laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan ini ada.

Dalam pelaksanaan Survei mandiri Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo kepada pengguna layanan, kuesioner yang disusun ini mengacu pada pedoman dari Kementerian PAN-RB. Adapun Kuisisioner Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang dibagikan ke responden adalah sebagai berikut:

1. Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini?
  - Seluruh petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
  - Sebagian besar petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
  - Sebagian kecil besar petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
  - Seluruh petugas pada pengadilan pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
2. Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini?
  - Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
  - Sebagian besar pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
  - Sebagian kecil pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
  - Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

3. Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan
  - Petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas, dll) diluar ketentuan yang ditetapkan oleh pengadilan
  - Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
  - Petugas pelayanan sering menerima/bahkan meminta imbalan (uang barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
  - Petugas pelayanan selalu menerima/bahkan meminta imbalan (uang barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
4. Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini?
  - Petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (Uang rokok, uang terima kasih, dll)
  - Sebagian besar petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (Uang rokok, uang terima kasih, dll)
  - Sebagian besar petugas layanan sering meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (Uang rokok, uang terima kasih, dll)
  - Sebagian besar petugas layanan selalu meminta imbalan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (Uang rokok, uang terima kasih, dll)

5. Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini?
- Seluruh petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
  - Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
  - Petugas pelayanan sering melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
  - Petugas layanan selalu melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan



## BAB II METODOLOGI SURVEI

### 2.1. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan ini dilakukan terhadap responden yang menggunakan layanan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo. Para responden mengisi Survei Persepsi Kualitas Pelayanan melalui aplikasi siSUPER pada link : [http://bit.ly/survey\\_ptgto](http://bit.ly/survey_ptgto) Setelah dilaksanakan penelitian di dapat sample sebanyak 31 (tiga puluh Satu) Responden yang mengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo periode Januari - Maret Tahun 2025.

### 2.2. Metode Penelitian

Lokasi Survei adalah tempat dimana petugas melakukan survei terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data survei yang akurat, dalam hal ini yaitu Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

### 2.3. Metode Pengolahan data Analisis

Analisis data untuk menentukan Indek Persepsi Kualitas Pelayanan menggunakan teknik statistik dekriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepi paling tinggi yang mencermikan kualitas birokrasi yang bersih korupsi.

Dalam persepsi kualitas pelayanan disajikan dalam bentuk *scoring*/angka absolute agar diketahui peningkatan/penurunan indek persepsi kualitas pelayanan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Teknik analisis perhitungan indeks persepsi kualitas pelayanan pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian konversikan ke

angka 0-100. Skala indeks persepsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi kualitas Pelayanan Publik yang Prima.

Kegiatan Pengumpulan data Kuesioner diawasi oleh Ketua Team Survei Pelayanan Yaitu **Masdin Daliuwa,S.H.** (Panmud Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo) Ketua Team survei akan mengecek kerja petugas pelaksana dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Adapun Proses Pelaksanaan Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- Responden yang telah selesai menerima layanan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo diarahkan untuk mengisi survei secara elektronik melalui Aplikasi SISUPER BADILUM yang terletak di area PTSP Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan alamat: [http://bit.ly/survey\\_ptgto](http://bit.ly/survey_ptgto)
- Isian data terhadap 5 (Lima) unsur pertanyaan yang telah ditetapkan didalam elektronik kuesioner (e-survey).
- Hasil dari pengisian kuesioner yang dilaksanakan melalui aplikasi SISUPER BADILUM Kemudian dianalisa by Sistem melalui aplikasi SISUPER Badan Peradilan umum Mahkamah Agung RI.
- Data Pendapat Responden yang terisi dalam kuesioner online kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

Setelah data terkumpul pada penelitian ini disusun dalam bentuk diagram frekuensi dan dianalisis dengan analisis statistik deskriptif.

Kesepuluh ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dalam 5 item, dengan 4 opsi jawaban. Adapun penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai 4.

**Tabel 1**  
**Ruang Lingkup Survei Persepsi Anti Korupsi**

No.	Ruang Lingkup
1	Tindakan diskriminasi
2	Indikasi kecurangan pelayanan
3	Pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku
4	Praktik pungutan liar
5	Praktik percaloan

**Tabel 2**  
**KATEGORI MUTU PELAYANAN**

NO	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1	A (Sangat Baik)	88,31-100,00	3,5323-4,00
2	B (Baik)	76,61-88,30	3,0644-3,532
3	C (Kurang Baik)	65,00-76,60	2,60-3,064
4	D (Tidak Baik)	25,00-64,99	1,00-2,5996

## BAB III PENGOLAHAN SURVEI

### 3.1. Analisis Hasil Survey

#### 3.1.1. Indikator Tindakan Diskriminasi

Indikator tindakan diskriminasi disampaikan untuk melihat apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya. Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator tindakan diskriminasi ini menunjukkan hasil pada indeks **4,00 (Empat Koma Nol)**.

Grafik 1  
Indeks Tindakan Diskriminasi

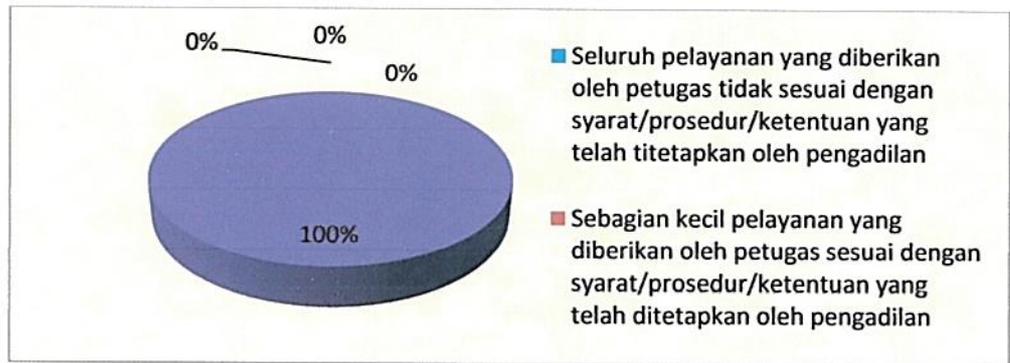


#### 3.1.2. Indikasi Kecurangan Pelayanan

Indikator Indikasi kecurangan pelayanan ini untuk melihat apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll. Dari skala 1-4 indikator Indikasi kecurangan pelayanan ini menunjukkan hasil pada indeks **4,00 (Empat Koma Nol)**.

Grafik 2

Indeks Indikasi Kecurangan Pelayanan

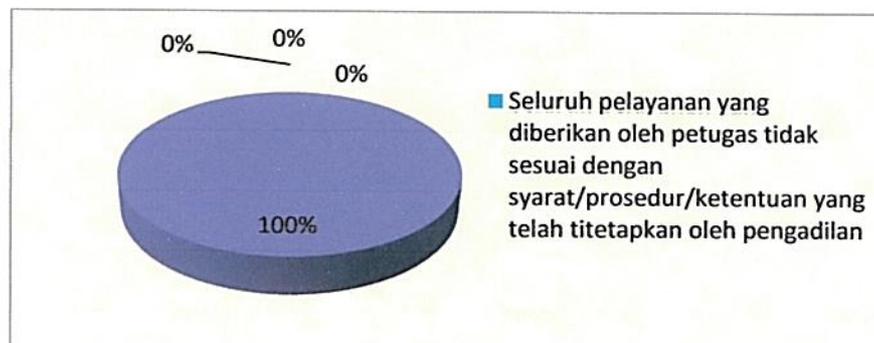


3.1.3. Pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku

Indikator pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku ini untuk mengetahui apakah petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemebrian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan. Dari skala 1-4 indikator pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku ini menunjukkan hasil pada indeks **4,00 (Empat Koma Nol)**.

Grafik 3

Indeks Pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku

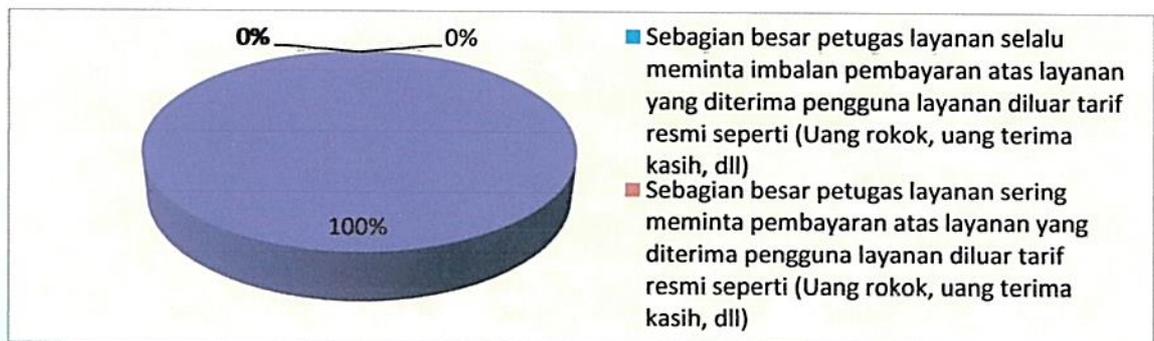


### 3.1.4. Praktik Pungutan Liar

Indikator praktik pungutan liar untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi. Dari skala 1-4 indikator praktik pungutan liar ini menunjukkan hasil pada indeks **4,00 (Empat Koma Nol)**

Grafik 4

Indeks Praktik Pungutan Liar

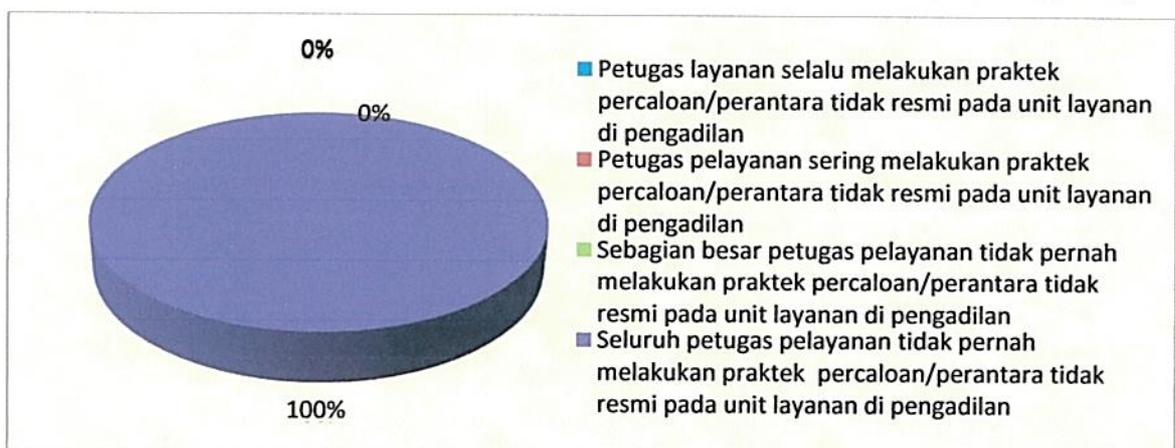


### 3.1.5. Praktik Percaloan

Indikator praktik percaloan ini untuk melihat apakah ada praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/ atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai. Dari skala 1-4 indikator praktik percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks **4,00 (Empat Koma Nol)**.

Grafik 5

Indeks Praktik Percaloan



Dari 5 indeks indikator di atas, maka diperoleh hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi Gorontalo sebesar **4,00** (empat Koma Nol). Jika dikonversikan menjadi **100,00** (Seratus Persen) Hal tersebut mengindikasikan bahwa persepsi kualitas persepsi anti korupsi di Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel

**Tabel 3**  
**Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Pengadilan Tinggi Gorontalo**

No.	Ruang Lingkup	Nilai
1	Tindakan diskriminasi	4,00
2	Indikasi kecurangan pelayanan	4,00
3	Pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku	4,00
4	Praktik pungutan liar	4,00
5	Praktik percaloan	4,00

### 3.2. Evaluasi Hasil Survey

Merujuk pada hasil indeks persepsi kualitas pelayanan setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk tersebut di atas, menunjukkan tiga indikator tertinggi dan terendah,

Tertinggi

1. Tindakan diskriminasi
2. Indikasi Kecurangan
3. Pemberian Imbalan

EVALUASI NILAI UNSUR		
3 Unsur Terendah		3 Unsur Tertinggi
No.	Unsur	Nilai
1	Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?	120
2	Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?	120
3	Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?	120

## Terendah

1. Tindakan Diskriminasi
2. Indikasi Kecurangan
3. Pemberian Imbalan

EVALUASI NILAI UNSUR		
3 Unsur Terendah		3 Unsur Tertinggi
No.	Unsur	Nilai
1	Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?	120
2	Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang berindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?	120
3	Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?	120

Adapun tindak lanjut perbaikan atas 3 unsur terendah adalah sebagai berikut:

### 1. Tindakan Diskriminasi

Untuk indikator ini sudah berada dikategori sangat baik, Pimpinan selalu memberikan pembinaan kepada petugas PTSP untuk menghormati dan menghargai setiap tamu yang berkunjung tanpa membeda-bedakan dalam memberikan Pelayanan.

### 2. Indikasi Kecurangan,

Untuk indikator ini sudah berada dikategori sangat baik Pimpinan selalu memberikan pembinaan kepada petugas PTSP jika dalam memberikan pelayanan terdapat kecurangan maka akan diberikan sanksi Tegas terhadap petugas tersebut.

### 3. Pemberian Imbalan,

Untuk Indikator ini petugas PTSP selalu diberikan pembinaan dan arahan berupa brifing Kepada Petugas agar selalu menjaga integritas Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan tidak menerima pemberian dari pihak agar melayani dengan ikhlas dan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dalam memberikan pelayanan kepada pihak informasi.

### 3.3 . Tindak Lanjut Hasil Survey

Adapun tindak lanjut Hasil terhadap hasil Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi 3 (tiga) nilai terendah adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola dan Penanggung Jawab PTSP memberikan Pembinaan terhadap para Petugas layanan agar senantiasa memberikan layanan sesuai dengan Prosedur yang berlaku tanpa memandang suku, agama, maupun Faktor kekerabatan/kekeluargaan antara Petugas layanan dengan Pengguna Layanan.
2. Pejabat Pengelola dan Penanggung Jawab PTSP meningkatkan Pengawasan terhadap penerapan Nomor antrian layanan sesuai dengan nomor antrian kedatangan sesuai dengan nomor antrian yang telah disediakan di ruang PTSP sehingga Penerima layanan tidak merasa di curangi dalam menerima layanan.
3. Pimpinan dan Pejabat Pengelola dan Penanggung Jawab PTSP selalu memberikan arahan melalui Briping atau pun rapat dinas guna mengingatkan kepada petugas pemberi layanan untuk menjunjung tinggi nilai integritas dalam memberi layanan serta menolak setiap pemberian imbalan dalam bentuk apapun dalam pemberian layanan kepada penerima layanan.

**BAB IV**  
**DATA SURVEI**

**4.1. Data Responden**

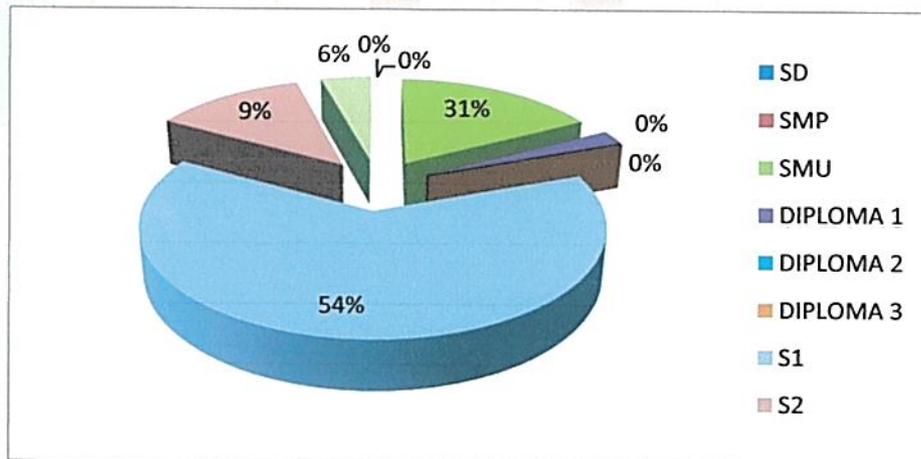
**4.1.1. Tingkat Pendidikan Responden**

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik pendidikan terakhir dibawah, mayoritas adalah S1 dengan jumlah 14 responden.

**Tabel 4**  
**RESPONDEN BERDASARKAN PENDIDIKAN**

PENDIDIKAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
SD	0	0%
SMP	0	0%
SMU	9	31%
DIPLOMA 1	0	0%
DIPLOMA 2	0	0%
DIPLOMA 3	0	0%
S1	14	54%
S2	6	9%
S3	2	6%
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>

**GRAFIK 11**  
**DATA PENDIDIKAN RESPONDEN**



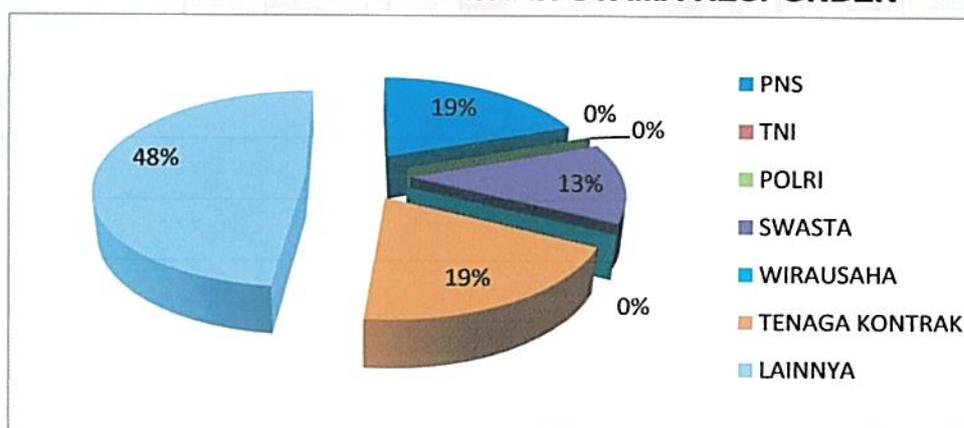
#### 4.1.2. Pekerjaan Utama Responden

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Pekerjaan Utama dibawah, mayoritas adalah Lainnya dengan jumlah 15 responden.

**Tabel 5**  
**RESPONDEN BERDASARKAN PEKERJAAN UTAMA**

PEKERJAAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
PNS	6	19%
TNI	0	0%
POLRI	0	0%
SWASTA	4	13%
WIRUSAHA	0	0%
TENAGA KONTRAK	6	19%
LAINNYA	15	48%
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>

**GRAFIK 12**  
**DATA PEKERJAAN UTAMA RESPONDEN**



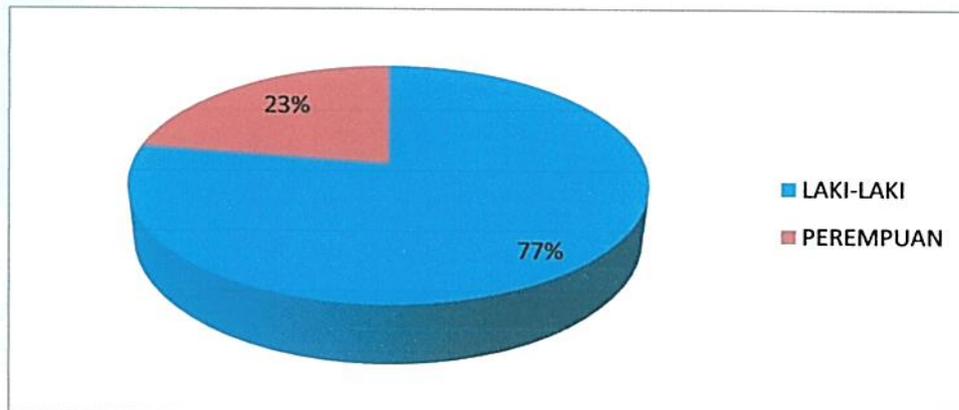
### 4.1.3. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 24 responden dan kelamin perempuan dengan jumlah 7 responden

**Tabel 6**  
**RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

JENIS KELAMIN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
LAKI-LAKI	24	77%
PEREMPUAN	7	23%
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>

**GRAFIK 13**  
**DATA JENIS KELAMIN RESPONDEN**



## 4.2. Data Dukung Lainnya

### 4.2.1. Indeks Total



## 4.2.2. Data Domisili Responden

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN	
Preview Publikasi	
Indeks Total	Data Umum Responden
	Data Domisili Responden
Daerah Domisili	Jumlah ( Orang )
1 SULAWESI TENGGARA	2
2 GORONTALO	29

## 4.2.3. Data Umur Responden

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur
Deskripsi			Jumlah ( Orang )		
18 - 28 Th			7	22.58	
29 - 39 Th			16	51.61	
40 - 49 Th			3	9.58	
50 - 59 Th			4	12.90	
60 - 69 Th			1	3.23	
Total			31		

## 4.2.4. Data Layanan

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN	
Preview Publikasi	
Indeks Total	Data Umum Responden
	Data Domisili Responden
	Data Umur Responden
	Data Layanan
Layanan	Jumlah ( Orang )
1 Layanan Hukum / Informasi	6
2 Layanan Administrasi Umum	25

## 4.2.5. Nilai Per Unsur

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur	
Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	Keterangan
Jumlah	124	124	124	124	124	
NRR Per RL	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
NRR Tertimbang	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	4.000
IPAK ZI Unit Pelayanan						100.00

## 4.2.6. Tiga Unsur Terendah

EVALUASI NILAI UNSUR		
3 Unsur Terendah	3 Unsur Tertinggi	
No	Unsur	Nilai
1	Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?	124
2	Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi keurangan pada unit layanan ini ?	124
3	Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?	124

## 4.2.7. Tiga Unsur Tertinggi

EVALUASI NILAI UNSUR	
3 Unsur Terendah	3 Unsur Tertinggi
No	Unsur
1	Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?
2	Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur ketentuan yang terdiksi keurangan pada unit layanan ini ?
3	Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang barang fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?

Nilai  
124  
124  
124

## 4.2.8. Data Umum Responden

No	Nama Kode Responden	Domisili	Umur/UK	Pendidikan/Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	Waktu Rekam
1	Ruji Utra R-864539-ZI-PAK-74C505EEA8 No HP : 82345195309	GORONTALO	36 Tahun Laki-laki	SMU TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	17 Maret 2025
2	Anonim R-864539-ZI-PAK-7EAB1A3396 No HP : 81384598800	GORONTALO	34 Tahun Laki-laki	S1 PNS	4	4	4	4	4	28 Februari 2025
3	Andi Adun Rahman R-864539-ZI-PAK-QA3A47B944 No HP : 82344555531	GORONTALO	38 Tahun Laki-laki	S1 PNS	4	4	4	4	4	28 Februari 2025
4	Hamid Hinggah R-864539-ZI-PAK-8B8560E1D No HP : 082191849239	GORONTALO	29 Tahun Laki-laki	SMU TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	28 Februari 2025
5	Kristna Towali, S Pd, M Pd R-864539-ZI-PAK-8B37A37E40 No HP : 85364007457	GORONTALO	38 Tahun Perempuan	S2 PNS	4	4	4	4	4	28 Februari 2025
6	Rahmat R. Mankar R-864539-ZI-PAK-13F978381C No HP : 085148021138	GORONTALO	29 Tahun Laki-laki	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	5 Februari 2025
7	Hasrul Arnung R-864539-ZI-PAK-A714S1A2D3 No HP : 08524090339	GORONTALO	34 Tahun Laki-laki	S1 TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	5 Februari 2025
8	ALDI PUTERA KAHARU R-864539-ZI-PAK-C5A1F2E119 No HP : 82345626753	GORONTALO	20 Tahun Laki-laki	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	5 Februari 2025
9	Herisa R-864539-ZI-PAK-4797BCA063 No HP : 085342729932	GORONTALO	38 Tahun Laki-laki	S2 LAINNYA	4	4	4	4	4	5 Februari 2025
10	ANDI SUBHAB R-864539-ZI-PAK-81A8EBB583 No HP : 08157099570	GORONTALO	44 Tahun Laki-laki	S3 LAINNYA	4	4	4	4	4	17 Januari 2025
11	Abdul Gafar L A Tjokke R-864539-ZI-PAK-B1DD273C61 No HP : 0812128638888	GORONTALO	62 Tahun Laki-laki	S3 PNS	4	4	4	4	4	17 Januari 2025
12	ELEN WAKEY R-864539-ZI-PAK-F03060E633 No HP : 85240406588	GORONTALO	51 Tahun Perempuan	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	18 Januari 2025
13	Moh Hamid Laya R-864539-ZI-PAK-5FAF70627F No HP : 89501902512	GORONTALO	28 Tahun Laki-laki	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	18 Januari 2025
14	Zhoenn Busura R-864539-ZI-PAK-7368355C4C No HP : 81385087938	GORONTALO	28 Tahun Laki-laki	S1 SIWASTA	4	4	4	4	4	18 Januari 2025
15	M. Fady Feranto R-864539-ZI-PAK-73E8602878 No HP : 8587904458	GORONTALO	29 Tahun Laki-laki	S1 PNS	4	4	4	4	4	15 Januari 2025
16	Muhlis J Mokodongan R-864539-ZI-PAK-5A15A53108 No HP : 86453808811	GORONTALO	52 Tahun Laki-laki	S2 LAINNYA	4	4	4	4	4	15 Januari 2025
17	Jufi R-864539-ZI-PAK-B3D5213CAC No HP : 8128333815	GORONTALO	33 Tahun Laki-laki	S2 SIWASTA	4	4	4	4	4	15 Januari 2025
18	Dew Ranti Usman R-864539-ZI-PAK-98D4172290 No HP : 81244545507	GORONTALO	28 Tahun Perempuan	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	15 Januari 2025
19	Amisha Hind Lestari R-864539-ZI-PAK-B5314A5409 No HP : 81235934555	GORONTALO	33 Tahun Perempuan	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	15 Januari 2025
20	Abby Mokodomp R-864539-ZI-PAK-AC8192C7D8 No HP : 81310234234	GORONTALO	40 Tahun Perempuan	S2 SIWASTA	4	4	4	4	4	15 Januari 2025

21	Mamad Dana R.884539-ZI-PAK-01822080D No. HP. 08258034813	GORONTALO	38 Tahun Laki-laki	S1 LAINYA	4	4	4	4	4	15 Januari 2025
22	Ansha Windi Lestari R.884539-ZI-PAK-28C1850AC8 No. HP. 81225934555	GORONTALO	33 Tahun Perempuan	S1 LAINYA	4	4	4	4	4	10 Januari 2025
23	Aldian R.884539-ZI-PAK-47AED75AE1 No. HP. 081342170550	GORONTALO	54 Tahun Laki-laki	SMU LAINYA	4	4	4	4	4	9 Januari 2025
24	Hanzah Zaees R.884539-ZI-PAK-5AE80F9103 No. HP. 082347003458	GORONTALO	35 Tahun Laki-laki	S1 LAINYA	4	4	4	4	4	8 Januari 2025
25	RHEVALD ANBAR PUTRA MURDIN R.884539-ZI-PAK-38340DB671 No. HP. 082177418220	GORONTALO	21 Tahun Laki-laki	SMU LAINYA	4	4	4	4	4	8 Januari 2025
26	Rahmat Cono R.884539-ZI-PAK-D420086550 No. HP. 08214704855	SULAWESI TENGGARA	40 Tahun Laki-laki	SMU TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	7 Januari 2025
27	Yeniadani Aranti R.884539-ZI-PAK-3220165528 No. HP. 08537882884	SULAWESI TENGGARA	33 Tahun Perempuan	SMU SINASTA	4	4	4	4	4	7 Januari 2025
28	Aroman Bobihoe R.884539-ZI-PAK-1BA63C1E77 No. HP. 81244100090	GORONTALO	51 Tahun Laki-laki	S2 LAINYA	4	4	4	4	4	7 Januari 2025
29	Rusi Ultra R.884539-ZI-PAK-8C8DC5A83A No. HP. 082348765309	GORONTALO	35 Tahun Laki-laki	SMU TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	7 Januari 2025
30	Muhammad Vikram R.884539-ZI-PAK-4EFD83FD4A No. HP. 082190898153	GORONTALO	24 Tahun Laki-laki	SMU TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	7 Januari 2025
31	Fanes Vadi R.884539-ZI-PAK-481808ED83 No. HP. 089802748340	GORONTALO	28 Tahun Laki-laki	S1 PLS	4	4	4	4	4	7 Januari 2025

Showing 31 to 31 of 31 entries

Previous 1 2 3 4 Next

**LAPORAN MONITORING EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)  
DI PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PERIODE JANUARI - MARET TAHUN 2025**

---

---

**A. Dasar Hukum**

1. SK DIRJEN BADILUM NO 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 Tanggal 8 April 2021 Tentang memberlakukan Aplikasi Survei Pelayan Elektronik (SISUPER) pada Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya;
2. SK DIRJEN BADILUM NO 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tanggal 28 Mei 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelaksanaan Elektronik pada Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya.

**B. Maksud dan Tujuan**

Tujuan dilakukannya Tindak Lanjut monitoring dan evaluasi Survei Persepsi Anti Korupsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kepuasan atas kebijakan Pelayanan Publik yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Gorontalo.
2. Sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan Pelayanan Publik yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Adapun manfaat yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya Peningkatan layanan dalam rangka mewujudkan Zona Integritas WBK/WBBM sesuai ketentuan dan kaidah yang berlaku.
2. Adanya tindaklanjut Monitoring dan evaluasi terkait Kepuasan Layanan Masyarakat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo.

**C. Hasil Monitoring dan Evaluasi**

Dari 5 indeks indikator di atas, maka diperoleh hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi Gorontalo sebesar **4,00** (Empat Koma Nol-Nol). Bila di konversi menjadi **100,00** ( Seratus ) Hal tersebut mengindikasikan bahwa persepsi kualitas persepsi anti korupsi di Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel.

Tabel 1

## Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Pengadilan Tinggi Gorontalo

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI
U1	Tindakan Diskriminasi	4,00
U2	Indikasi kecurangan pelayanan	4,00
U3	Pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku	4,00
U4	Praktik pungutan liar	4,00
U5	Praktik percaloan	4,00

## A. Tindak Lanjut Hasil Survei

Merujuk pada hasil indeks persepsi anti korupsi setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk tersebut di atas, menunjukkan tiga indikator terendah,

## Tertinggi

1. Tindakan Diskriminasi
2. Indikasi Kecurangan
3. Pemberian Imbalan

## Terendah

1. Tindakan Diskriminasi
2. Indikasi Kecurangan
3. Pemberian Imbalan

Adapun tindak lanjut perbaikan atas 3 unsur terendah adalah sebagai berikut:

## 1. Tindakan Diskriminasi

Untuk Indikator ini sebenarnya sudah berada di Katagori sangat baik, namun Pimpinan Tetap selalu Memberikan pembinaan kepada petugas PTSP melalui Briping Kepada Petugas untuk selalu menjalankan Pelayanan sesuai dengan (SOP) yang ada tanpa membeda-bedakan Pelayanan Kepada pengguna layanan.

## 2. Indikasi Kecurangan

Untuk indikator ini sudah berada dikatagori sangat baik, namun Petugas PTSP tetap selalu diberikan pembinaan jika dalam memberikan pelayanan terdapat kecurangan maka akan di berikan sanksi Tegas.

3. Pemberian Imbalan.

Untuk indikator ini sudah berada dikatagori sangat baik namun Pimpinan Tetap selalu mengingatkan agar Petugas PTSP atau pun Pegawai untuk tetap selalu bekerja sesuai dengan SOP yang ada serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Pengguna Layanan.

Demikianlah Laporan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan koreksi dan masukan terhadap perbaikan pelaksanaan Kinerja pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.

